



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : PRAYUDI SYAMSURI
- Jabatan : DIREKTUR
- NHK : 756854

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.810.100.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 1.428.500.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/37 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 241.600.000
- Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.800.000

- MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.800.000
- MOTOR, HONDA SCOOPY PRESTICE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. 18.663.400**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.456.726.665**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.406.290.065

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.406.290.065

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.